



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**MERDEKA BELAJAR EPISODE 16:
AKSELERASI DAN PENINGKATAN PENDANAAN
PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN**

Jakarta, 15 Februari 2022

Episode Merdeka Belajar hingga saat ini...



EPISODE 1
MERDEKA BELAJAR



EPISODE 2
KAMPUS MERDEKA



EPISODE 3
PERUBAHAN
MEKANISME BOS



EPISODE 4
PROGRAM
ORGANISASI
PENGGERAK



EPISODE 5
PROGRAM GURU
PENGGERAK



EPISODE 6
TRANSFORMASI
DANA PEMERINTAH
UNTUK PENDIDIKAN
TINGGI



EPISODE 7
PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK



EPISODE 8
SMK PUSAT
KEUNGGULAN



EPISODE 9
KIP KULIAH MERDEKA



EPISODE 10
PERLUASAN
PROGRAM
BEASISWA LPDP



EPISODE 11
KAMPUS MERDEKA
VOKASI



EPISODE 12
SEKOLAH AMAN
BERBELANJA
DENGAN SIPLAH



EPISODE 13
MERDEKA
BERBUDAYA DENGAN
KANAL INDONESIA



EPISODE 14
KAMPUS
MERDEKA DARI
KEKERASAN
SEKSUAL



EPISODE 15
KURIKULUM
MERDEKA DAN
PLATFORM MERDEKA
MENGAJAR



EPISODE 16
AKSELERASI DAN
PENINGKATAN
PENDANAAN PAUD DAN
PENDIDIKAN
KESETARAAN

Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 - 2021

berdampak nyata pada
sekolah dan mendapatkan
tanggapan positif

01

Nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah

Satuan Pendidikan	Satuan Biaya	Jumlah Kab/ Kota	Rata-rata Kenaikan (%)
SD	Rp900 ribu s.d. Rp1,9 juta	377	12,19%
SMP	Rp1,1 juta s.d. Rp2,4 juta	381	13,23%
SMA	Rp1,5 juta s.d. Rp3,4 juta	386	13,68%
SMK	Rp1,6 juta s.d. Rp3,7 juta	387	13,61%
SLB	Rp3,5 juta s.d. Rp7,9 juta	390	13,18%

Dalam survei Litbang Kompas (2021), **84,1%** responden sekolah setuju dengan kebijakan satuan biaya BOS bervariasi

Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 - 2021

berdampak nyata pada
sekolah dan mendapatkan
tanggapan positif

02 Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah

- Mengurangi keterlambatan sebesar **32%** atau sekitar **tiga minggu lebih cepat** dibandingkan tahun 2019
- **85,5%** responden sekolah dan **96,1%** responden pemerintah daerah memandangi penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan

Reformasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 - 2021

berdampak nyata pada
sekolah dan mendapatkan
tanggapan positif

03 Penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibel

- 81,4% responden sekolah dan 92,9% responden pemerintah daerah memandang fleksibilitas penggunaan BOS memudahkan atau sangat memudahkan



Penyaluran dana BOS merupakan sebuah inovasi dengan percepatan yang memangkas jalur birokrasi sampai ke sekolah-sekolah. Percepatan sampai ke satuan pendidikan, mempermudah rentang kendali yang tadinya perlu dengan berbagai akses, sekarang ke satu titik yaitu satuan pendidikan. Harapan kami kepada pemerintah pusat adalah pengintegrasian sistem antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD sehingga akan mempermudah penyaluran.

Dedi Supandi

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat



Penyaluran Dana BOS langsung ke rekening satuan pendidikan sangat membantu kami karena tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit. Dan pihak sekolah dapat mencairkan langsung melalui bank yang telah ditunjuk sehingga lebih efisien waktu. Sekolah lebih dimudahkan dalam bertransaksi dengan penyedia lokal maupun lewat SIPLah. Terkait kenaikan biaya sesuai dengan wilayah sudah sesuai karena di tiap daerah memiliki kemahalan yang berbeda-beda.

Christina Deasy Montol

Kepala SD Inpres Lowu, Kab. Minahasa Tenggara



Dalam hal pemberian honor guru, itu sangat membantu. Sebelumnya, mereka dapatkan dari 300 ribu sampai 850 ribu, sekarang itu yang paling rendah mereka mendapatkan 1,2 juta per bulan dan paling tinggi 1,5 juta per bulan.

Nurdin Achmad

Kepala SMP Negeri 1 Banda, Kab. Maluku Tengah



Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sungguh membantu kami langsung pakai dana BOS, jadi tidak perlu menunggu lama. Dana BOS sekarang juga lebih fleksibel untuk kita pakai sesuai kebutuhan sekolah, terutama membeli perlengkapan pendukung PTM Terbatas.

Surdianah

Kepala SDN Sermong, Kab. Sumbawa Barat



Dengan dana BOS yang tepat jumlah, tepat waktu, ada relaksasi-relaksasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah ini sangat membantu kegiatan pembelajaran.

Supriyadi

Kepala SMP Negeri 1, Kab. Banyuwangi

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya
BOP PAUD
bervariasi sesuai
karakteristik daerah



02

Penyaluran
BOP PAUD dan
BOP Kesetaraan
langsung ke satuan
pendidikan



03

Penggunaan
BOP PAUD dan
BOP Kesetaraan
yang fleksibel



04

Perencanaan dan
pelaporan BOS
menggunakan
ARKAS sebagai
aplikasi tunggal

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya
BOP PAUD
bervariasi sesuai
karakteristik daerah



02

Penyaluran
BOP PAUD dan
BOP Kesetaraan
langsung ke satuan
pendidikan



03

Penggunaan
BOP PAUD dan
BOP Kesetaraan
yang fleksibel



04

Perencanaan dan
pelaporan BOS
menggunakan
ARKAS sebagai
aplikasi tunggal

01

Mulai tahun 2022, nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah

Berdasarkan Keputusan Mendikbudristek No 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan BOP Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah

Kebijakan BOP PAUD tahun 2021

Satuan biaya yang sama berlaku untuk semua wilayah

Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun: Rp600.000

2021

Kebijakan BOP PAUD tahun 2022

Satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah Kabupaten/ Kota

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun: Rp600.000 – Rp1.200.000

- Untuk 244 kabupaten/kota, satuan biaya BOP PAUD tetap
- Untuk 270 kabupaten/kota, satuan biaya BOP PAUD mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan 9,5%

2022

Karena keterbatasan anggaran, satuan biaya BOP Kesetaraan tetap sama untuk semua wilayah pada tahun 2022 dan akan diupayakan mulai bervariasi mulai tahun 2023

01

Contoh kenaikan nilai satuan biaya BOP PAUD

		BOP PAUD 2021		BOP PAUD 2022
TK NEGERI PEMBINA (11003208) KAB. KEP. ANAMBAS PROV. KEP. RIAU	Satuan biaya	Rp600.000	↑ 48%	Rp890.000
	Besaran alokasi	Rp69.000.000		Rp102.350.000
TK KASIH IBU (69921358) KAB. MAHAKAM ULU PROV. KALIMANTAN TIMUR	Satuan biaya	Rp600.000	↑ 63%	Rp980.000
	Besaran alokasi	Rp38.400.000		Rp62.720.000
PAUD LUPUK (69953779) KAB. LANNY JAYA PROV. PAPUA	Satuan biaya	Rp600.000	↑ 100%	Rp1.200.000
	Besaran alokasi	Rp16.200.000		Rp32.400.000

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai karakteristik daerah



02

Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan



03

Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel



04

Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal

02

Mulai tahun 2022, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan. Dana bantuan akan diterima dalam waktu tercepat sejak program BOP dimulai.

Pada tahun 2021, penyaluran dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahap 1 ke **kabupaten/kota** terjadi bulan **April-Desember**

Sumber: Aplikasi Aladin Kemkeu, 2021



2021

Linimasa penerimaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahap I

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

2022

100%

Pada tahun 2022, penyaluran dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahap I mulai disalurkan ke **satuan pendidikan** bulan **Februari** dan **100%** akan diterima bulan **Maret**

02

Penyaluran langsung ke satuan pendidikan berarti satuan pendidikan wajib memastikan validitas data dalam data pokok pendidikan

Persyaratan satuan pendidikan penerima BOP PAUD dan BOP Kesetaraan

1. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
2. Telah memutakhirkan data pokok pendidikan sesuai kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya*
3. Memiliki izin penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan swasta
4. Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan
5. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama
6. Jumlah peserta didik yang dihitung sebagai basis BOP merupakan peserta didik yang memiliki NISN

**khusus tahun 2022, diberikan dispensasi hingga 7 Desember 2021*

Karena keterbatasan anggaran, jumlah minimum 10 peserta didik masih berlaku sebagai persyaratan penerima BOP Kesetaraan. Namun, **tidak ada lagi jumlah minimum peserta didik untuk penerima BOP PAUD maupun BOS.**

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai karakteristik daerah



02

Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan



03

Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel



04

Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal

03

Penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan satuan pendidikan

	Kebijakan Sebelumnya	2022
Ruang lingkup penggunaan	<p>Ruang lingkup penggunaan mencakup 3 komponen dan pemanfaatannya dibatasi persentase untuk setiap komponen penggunaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pembelajaran dan Bermain, paling sedikit 50% 2. Kegiatan pendukung pembelajaran, paling banyak 35% 3. Kegiatan lainnya (operasional), paling banyak 15% 	<p>Ruang lingkup penggunaan dana 11 komponen dan pemanfaatannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penerimaan Peserta Didik baru; 2. pengembangan perpustakaan dan/ atau layanan pojok baca; 3. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; 4. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; 5. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; 6. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; 7. pembiayaan langganan daya dan jasa 8. pemeliharaan sarana dan prasarana; 9. penyediaan alat multimedia pembelajaran pada BOP Pendidikan Kesetaraan; 10. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi dan kebersihan pada BOP PAUD 11. pembayaran honor

03

Penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi lebih fleksibel sesuai kebutuhan satuan pendidikan

	Kebijakan Sebelumnya	2022
Ketentuan pembayaran honor	Pembayaran honor hanya untuk pendidik	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran honor dapat untuk pendidik dan tenaga kependidikan;2. Pembayaran honor maksimal 50% dalam kondisi normal;3. Tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah.

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)



01

Nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai karakteristik daerah



02

Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan



03

Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel



04

Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal

04

Selama ini sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah

Kondisi sebelumnya

Sekolah mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran secara manual pada sistem dari pemerintah daerah dan sistem dari pemerintah pusat

Dampaknya

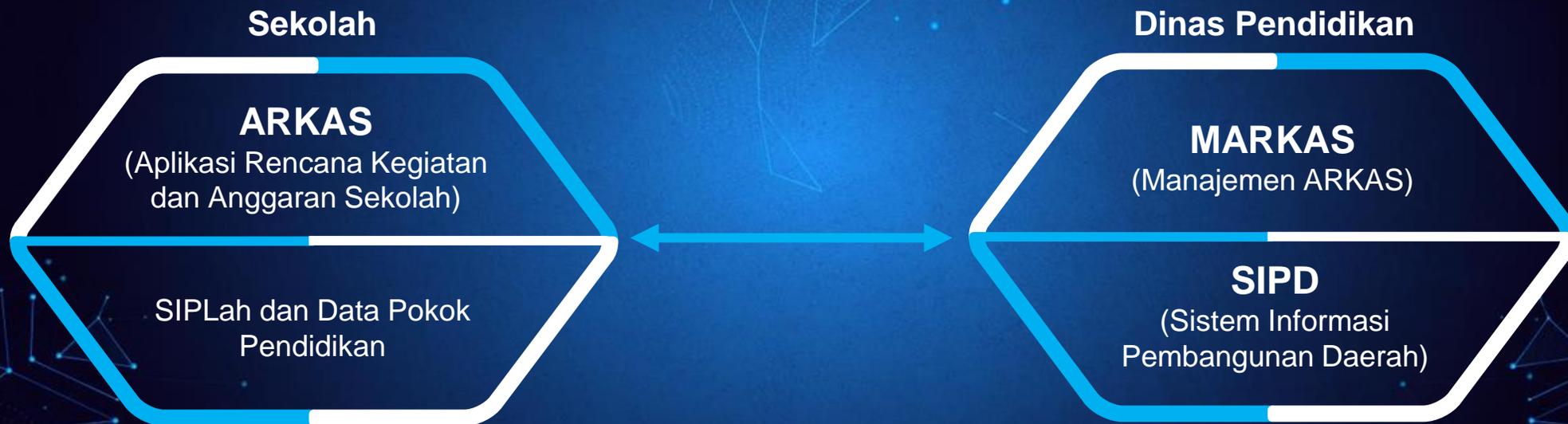
Sekolah menghabiskan waktu dan tenaga yang berlebih untuk keperluan administrasi

04

Kemendikbudristek bersama Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah

ARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS, dan ARKAS terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya

MARKAS menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS, dan MARKAS terintegrasi dengan SIPD



Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS

04

Sekolah dan Dinas Pendidikan lebih mudah mengelola **Dana BOS** dengan penggunaan **ARKAS** dan **MARKAS** yang terintegrasi dengan **SIPD**

Kategori	Sebelum	Sesudah
Aplikasi Anggaran	Terdapat beberapa aplikasi pengelolaan anggaran sekolah	Sekolah cukup input ke satu aplikasi pengelolaan anggaran sekolah yang terhubung dengan aplikasi daerah (SIPD) dan data pokok pendidikan
Format Data	Format data dan standar acuan masih bervariasi	Format data dan standar acuan sudah terstandarisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku
Persetujuan Dokumen	Proses persetujuan dokumen memakan waktu karena alur bervariasi	Proses persetujuan dokumen dipercepat dengan standarisasi dan otomasi alur
Konsolidasi Anggaran	Proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas dilakukan secara manual	Proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas terotomatisasi

04

Sekolah dan Dinas Pendidikan, mari segera menggunakan ARKAS dan MARKAS. Tata cara penggunaan dan bantuan dapat diakses melalui satu portal.

Untuk sekolah dapat menggunakan ARKAS, Dinas Pendidikan harus terhubung ke MARKAS terlebih dahulu.

- Sosialisasi ke sekolah dan Dinas Pendidikan akan mulai dilakukan pada bulan Maret 2022
- Pengelolaan BOP tahun 2022 masih melalui portal <https://bop.kemdikbud.go.id/>, dan akan mulai menggunakan ARKAS/ MARKAS pada tahun 2023



Cara Dinas Pendidikan mengakses **MARKAS**

1

Kunjungi <https://rkas.kemdikbud.go.id/>

2

Pilih tombol “Login Dinas”

3

Pilih “Daftar” dan Lakukan registrasi dengan mengisi data yang diminta

4

Mengisi informasi yang diminta (email, NIP, dll.)

5

Login dan MARKAS siap digunakan



Cara sekolah mengunduh dan mengakses **ARKAS**

1

Kunjungi <https://rkas.kemdikbud.go.id/download>

2

Pilih “Unduhan” dan klik “Unduh”

3

Install file yang telah diunduh

4

Lakukan registrasi dengan NPSN dan hubungi dinas untuk mendapatkan kode aktivasi

5

Login dan ARKAS siap digunakan

KESIMPULAN

Reformasi kebijakan Pemerintah terkait BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan tahun 2022 bertujuan untuk mengakselerasi dan meningkatkan pendanaan pendidikan



01

Nilai satuan biaya
BOP PAUD
bervariasi sesuai
karakteristik daerah



02

Penyaluran
BOP PAUD dan
BOP Kesetaraan
langsung ke satuan
pendidikan



03

Penggunaan
BOP PAUD dan
BOP Kesetaraan
yang fleksibel



04

Perencanaan dan
pelaporan BOS
menggunakan
ARKAS sebagai
aplikasi tunggal

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI